

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada prinsipnya merupakan suatu proses perubahan atau proses transformasi ekonomi, sosial dan budaya, bahkan mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, kelembagaan, sehingga harus dikonsepsikan secara tepat dan dengan strategi pelaksanaannya yang mantap. Pembangunan sejatinya menempatkan manusia (masyarakat) sebagai orientasi utama dan terpenting sehingga terus diupayakan peningkatan ketahanan (sustenance) dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, perekonomian dan proteksi) untuk keberlangsungan hidupnya; harga diri (self esteem), yakni pembangunan yang efektif memanusiakan manusia, meningkatkan jati diri dan kebanggaannya sebagai manusia yang beradab.

Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Terdapat di negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah, peranan usaha kecil dan menengah (UKM) sangatlah penting. Seperti di beberapa negara kawasan Afrika, perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) sekarang diakui sangat penting untuk menaikkan output aggregate dan kesempatan kerja (Tambunan, 2002).

Di Indonesia hal itu bisa dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. (Sulistiyastuti, 2004) terdapat peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yaitu (1) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia,(2) Penyedia kesempatan kerja,(3), Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, (4), Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan, dan- (5) memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas (Triamita, 2012).

Seringkali masalah yang timbul di negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.Sederhananya, tidak semua pekerjaan yang tersedia adalah “pekerjaan yang layak”.Mereka yang bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar secara konsep memang bekerja, namun mereka tidak memenuhi kriteria kelayakan dari sudut pandang ekonomi.(BPS, 2017).

Berlakunya otonomi daerah, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim berusaha atau bersaing di daerah.Era Otonomi Daerah memberikan implikasi yaitu daerah merencanakan sendiri pembangunan di daerahnya dengan

dukungan sumberdaya lokal. Hal ini menjadikan posisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat penting untuk mewujudkan pengembangan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat. Relevansi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pembangunan ekonomi tersebut makin relevan dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Kebijakan regional dalam otonomi daerah akan sangat berpengaruh terhadap insentif pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing wilayah. Pertumbuhan dan perubahan kegiatan usaha ekonomi dalam berbagai skala: mikro, kecil menengah dan usaha besar perlu diketahui secara seksama dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Demikian juga peta usaha, *database* dan direktori usaha atau perusahaan yang lengkap, rinci dan *up to date* sangat diperlukan untuk menggambarkan potensi dan perkembangan kegiatan ekonomi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Fauzi 2011).

Pengembangan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan ekonomi lokal sesuai potensinya menjadi sangat penting. Sudah selayaknya apabila pada era desentralisasi isu tersebut makin mendapat perhatian. Dengan beberapa keunggulannya, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki posisi yang strategis bagi pengembangan ekonomi regional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, penggalan potensi daerah menuju spesialisasi regional penting mendapat perhatian. era desentralisasi dan

pengembangan ekonomi regional maka peranan dan posisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang strategis tersebut tentu sangat relevan bagi keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi. Menurut (Sjafrijal, 2012). Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu merupakan karakteristik pertama dari sebuah pusat pertumbuhan. Bahwa analisis pusat pertumbuhan ini tidak berlaku untuk kegiatan ekonomi tertentu saja, tetapi harus menyangkut dengan berbagai kumpulan berbagai ekonomi. Sebab kegiatan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada lokasi tertentu, pusat pertumbuhan yang berlokasi pada daerah perkotaan atau daerah tertentu yang mempunyai potensi ekonomi spesifik seperti daerah pertambangan, pelabuhan, perkebunan, industri dan lain-lainnya. Konsentrasi dari sebuah pusat pertumbuhan adalah adanya keterkaitan yang erat dari segi input dan output antara sesama kegiatan ekonomi yang terdapat didalamnya.

Indikator perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan melalui perkembangan jumlah PDRB. Fokus pembangunan ekonomi nasional selalu menggunakan tumpuan yang bersifat regional dalam pelaksanaan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, oleh karena hal tersebut, pembangunan pada tingkat kabupaten/kota menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan nasional (Arif dan Utomo, 2016). Percepatan pembangunan daerah yang paling efektif adalah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.

Menurut Kuncoro, (2012). Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial dalam suatu Negara menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif di pandang dari dimensi geografis. Perubahan paradigma pembangunan di negara- negara sedang berkembang seperti Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi, telah menjadikan orientasi pembangunan yang semula pada sektor pertanian mulai tergantikan oleh industrialisasi (Soetrisno, 1999 dalam, Wikuwanara 2018).

Pengalaman pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian (Arsyad 1999). Berdasarkan kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara termasuk juga Indonesia.

Menurut Sun'an & Senuk (2015) Salah satu pilar ekonomi kerakyatan adalah keberadaan usaha ekonomi skala kecil dan menengah (UKM) yang dalam ini menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Usaha Kecil dan menengah (UKM) banyak dikerjakan oleh sebagian besar tenaga kerja Indonesia disebabkan berbagai alasan diantaranya; jumlah modal yang relative sangat sedikit, tidak menghendaki trampilan yang tinggi, dan perizinan yang tidak berbelit. Dengan karakteristik yang semacam itu jumlah Usaha Kecil dan menengah (UKM) menjadi sangat besar dan secara otomatis mendorong penyerapan tenaga kerja.

Hal ini tidak terjadi pada daerah-daerah yang ada di Indonesia akan tetapi juga terjadi pada Negara yang lain, khususnya pada Negara yang sedang berkembang. Seperti daerah-daerah di Indonesia, perkembangan jumlah UKM yang sangat besar tidak sekaligus indentik dengan sumbangnya yang sangat besar terhadap pendapatan nasional (PDB) maupun kesejahteraan ekonominya. Hal ini menandakan nilai tambah yang berhasil diakumulasi oleh UKM masih sangat terbatas dibandingkan dengan usaha besar, sehingga kontribusi UKM terhadap pendapatan suatu daerah maupun nasional masih rendah.

Kota Tidore kepulauan di satu sisi masih diperhadapkan pada sejumlah permasalahan mendasar, antara lain upaya memperkuat perekonomian daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, pemerataan infrastruktur dan akses pelayanan publik, dan belum optimalnya kebijakan pengelolaan sektor-sektor basis daerah, belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan modal sosial di dalam masyarakat guna menyokong percepatan pembangunan berbasis partisipasi.

Angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan antarsektor, tingginya angka inflasi, adalah gambaran belum maksimalnya interkoneksi kinerja makro ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil. Inflasi yang relatif tinggi menurunkan pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Ketimpangan akses sumberdaya ekonomi, ketimpangan pembangunan

antar kecamatan menjadi hambatan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Problem pengangguran dan minimnya ketersediaan lapangan kerja baru mengindikasikan tidak terjadinya transmisi ekonomi sektor riil. Kondisi demikian mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan belum dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Permasalahan yang ada menegaskan bahwa konsep pembangunan Kota Tidore Kepulauan harus di desain kembali (redesign) melalui evaluasi dan penyempurnaan untuk mencapai keseimbangan kinerja makro dan mikro ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi harus berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, berkurangnya kesenjangan antarwilayah atau antarkecamatan, menekan inflasi pada titik yang konduktif, meningkatnya kemandirian masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).

Pada aras demikian Visi dan Misi Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020- 2025 Calon Walikota dan Wakil Walikota Basri Salama, S.Pd dan Ustadz, Dr. M Guntur Alting, M.Pd, M.Si di susun berpijak kokoh di atas realitas dan kondisi obyektif Kota Tidore Kepulauan hari ini. Selain itu visi dan misi ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005- 2025,

Peraturan Daerah No 25 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2033.

Data pelaku UMKM di Kota Tidore Kepulauan sejauh ini sekitar 8.000 lebih. Namun yang paling banyak adalah pelaku usaha ultra mikro seperti penjual es di pinggir rumah dan lainnya. Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pelaku UMKM itu dilakukan melalui program Banpres untuk penguatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro maupun ultra mikro. Banpres yang disalurkan ke Kota Tidore Kepulauan pada akhir 2020 dan awal 2021 itu senilai Rp 15,1 miliar Cermat (2021).

1.1. Tabel Tenaga Kerja dan Unit Usaha perkecamatan di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020.

<b>Kecamatan</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
<b>Oba Selatan</b>	245	1259
<b>Oba Tengah</b>	155	840
<b>Oba Utara</b>	794	428
<b>Tidore Selatan</b>	250	571
<b>Tidore Timur</b>	52	872
<b>Tidore Utara</b>	311	484
<b>Oba</b>	33	610
<b>Tidore</b>	201	364

Seperti Pada Tabel 1.1. jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Kota Tidore Kepulauan perkecamatan di tahun 2020 tersebut, jumlah usaha yang paling banyak yaitu 794 unit usaha terdapat di Kecamatan Oba Utara, dengan menyumbang tenaga kerja pada UKM sebanyak 428

orang, Kecamatan Tidore Utara dengan urutan kedua jumlah unit usaha sebesar 311 dan menyumbang tenaga kerja sebanyak 484 orang, urutan ketiga terdapat di Kecamatan Tidore Selatan dengan unit usaha sebesar 250 dan menyumbang tenaga kerja sebanyak 571 orang, urutan keenam terdapat di Kecamatan Oba Selatan unit usaha sebesar 245 dengan menyumbang tenaga kerja sebanyak 1259 .

Untuk Kecamatan Tidore berada di urutan kelima dengan unit usaha sebesar 201 dengan menyumbang tenaga kerja sebesar 364 orang, urutan keenam terdapat di Kecamatan Oba Tengah unit usaha sebesar 155 dengan menyumbang tenaga kerja sebanyak 840, urutan ketujuh berada di Kecamatan Tidore Timur unit usaha sebesar 52 dengan menyumbang tenaga kerja sebanyak 872 orang, dan urutan terakhir terdapat di Kecamatan Oba dengan unit usaha sebesar 33 dengan menyumbang tenaga kerja sebanyak 610 orang.

Berdasarkan uraian fenomena dan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Analisis Konsentrasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tidore”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika konsentrasi usaha kecil dan menengah antar kecamatan di Kota Tidore?
1. Bagaimana dinamika konsentrasi tenaga kerja, usaha kecil dan menengah di Kota Tidore menurut Kecamatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika konsentrasi UKM antar kecamatan di kota Tidore.
2. Untuk Menganalisis dinamika Konsentrasi tenaga kerja, Sektor Usaha Kecil dan menengah di kota Tidore menurut Perkecamatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Akan terdapat manfaat yang diberikan dalam penelitian ini, terhadap pihak-pihak terkait, antaranya:

1. Penelitian ini dapat menjadi dasar atau informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, untuk konsentrasi ekonomi wilayah usaha kecil Dan menengah menurut perkecamatan di kota Tidore.
2. Bagi pengambil kebijakan, instansi serta lembaga terkait lainnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan meningkatkan tenaga kerja dan usaha Kecil dan menengah (UKM) konsentrasi di kota Tidore.